

LAMPIRAN
LAPORAN TAHUNAN KPK
2019



BIRO HUKUM

PENGUATAN YURIDIS

No.	Kegiatan	Uraian
1	Partisipasi dalam penyusunan rancangan legislasi/regulasi eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Hak Keuangan Pimpinan KPK. 2. Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 3. Rancangan Perpres Organ Pelaksana Dewan Pengawas. 4. Rancangan Tata Cara Pengangkatan Ketua Dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 5. Rancangan Perpres Supervisi. 6. Rancangan KUHP. 7. Rancangan KUHAP.
2	Rancangan dan harmonisasi peraturan (regulasi) internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberian Gaji Ketiga Belas dan Gaji Keempat Belas kepada Pegawai & Penasihat KPK (Ditetapkan 16 Mei 2019 & diundangkan 17 Mei 2019) 2. Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Ditetapkan 5 November 2019) 3. Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Penggajian Penasihat dan Pegawai KPK (Ditetapkan 9 Desember 2019 & diundangkan 12 Desember 2019) 4. Peraturan Komisi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Benturan Kepentingan di KPK (Ditetapkan 12 Desember 2019 & Diundangkan 18 Desember 2019) 5. Peraturan Pimpinan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penataan Karier di KPK (Ditetapkan 23 Januari 2019) 6. Peraturan Pimpinan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Senjata Api Dinas & Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api di KPK (Ditetapkan 15 Februari 2019) 7. Peraturan Pimpinan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengawasan dan Pengamanan Tahanan (Ditetapkan 4 Maret 2019) 8. Peraturan Pimpinan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Magang di Lingkungan KPK (Ditetapkan 19 Agustus 2019) 9. Peraturan Pimpinan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja untuk Kegiatan yang Bersifat Rahasia di Lingkungan KPK (Ditetapkan 23 Agustus 2019) 10. Peraturan Pimpinan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja KPK (Ditetapkan 11 September 2019) 11. Peraturan Pimpinan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pimpinan Nomor 1 Tahun 2018 (Ditetapkan 10 Oktober 2019) 12. Peraturan Pimpinan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Dewan Pengawas dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (Ditetapkan 14 November 2019) 13. Peraturan Pimpinan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko KPK (Ditetapkan 28 November 2019) 14. Rancangan Peraturan Pimpinan tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15. Rancangan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 16. Rancangan Peraturan tentang Sistem Promosi Pegawai 17. Rancangan Peraturan Pimpinan tentang Pemberian Penghargaan Masa Kerja

No.	Kegiatan	Uraian
		<p>18. Rancangan Perkom tentang Proses Bisnis (dibatalkan)</p> <p>19. Keputusan Pimpinan Nomor 136 Tahun 2019 Tentang Penetapan Saksi Pelaku Yg Bekerjasama Jc An EK</p> <p>20. Keputusan Pimpinan Nomor 171 Tahun 2019 tentang Penetapan Saksi Pelaku Yg Bekerjasama Jc An AA</p> <p>21. Keputusan Pimpinan Nomor 214 Tahun 2019 tentang Pemberian Perlindungan Pelapor An Dfp</p> <p>22. Keputusan Pimpinan Nomor 247 Tahun 2019 tentang Pemberian Perlindungan Saksi Kepada NRN</p> <p>23. Keputusan Pimpinan Nomor 270 Tahun 2019 tentang Pemberian Perlindungan Saksi Kepada ICL</p> <p>24. Keputusan Pimpinan Nomor 346 Tahun 2019 tentang Penetapan Saksi Pelaku Yg Bekerjasama Jc An ABN</p> <p>25. Keputusan Pimpinan Nomor 386 Tahun 2019 tentang Penetapan Saksi Pelaku Yg Bekerjasama Jc An HS</p> <p>26. Keputusan Pimpinan Nomor 631 Tahun 2019 tentang Penetapan Gedung Merah Putih Kpk Sebagai Obyek Vital Nasional</p> <p>27. Keputusan Pimpinan Nomor 636 Tahun 2019 tentang Pemberian Perlindungan Saksi An DHF</p> <p>28. Keputusan Pimpinan Nomor 757 Tahun 2019 tentang Penghentian Perlindungan Saksi An AT</p> <p>29. Keputusan Pimpinan Nomor 803 Tahun 2019 tentang Pemberian Perlindungan Saksi An LAM</p> <p>30. Keputusan Pimpinan Nomor 1017 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Perlindungan Saksi An K</p> <p>31. Keputusan Pimpinan Nomor 1224 Tahun 2019 tentang Penetapan Saksi Pelaku Yg Bekerjasama Jc An BTS</p> <p>32. Keputusan Pimpinan Nomor 1283 Tahun 2019 tentang Penetapan Saksi Pelaku Yg Bekerjasama Jc An BRK</p> <p>33. Keputusan Pimpinan Nomor 1309 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Perlindungan Saksi An HK</p> <p>34. Keputusan Pimpinan Nomor 1372 Tahun 2019 tentang Penetapan Saksi Pelaku Yg Bekerjasama Jc An MMW</p> <p>35. Keputusan Pimpinan Nomor 1397 Tahun 2019 tentang Perlindungan Saksi An MD</p> <p>36. Keputusan Pimpinan Nomor 1616 Tahun 2019 tentang Keputusan Ttg Pemberian Perlindungan Saksi An RW</p> <p>37. Keputusan Pimpinan Nomor 1902 Tahun 2019 tentang Penetapan Saksi Pelaku Yg Bekerjasama Jc An LH</p> <p>38. Keputusan Pimpinan Nomor 1989 Tahun 2019 tentang Penetapan Saksi Pelaku Yg Bekerjasama Jc An MIA</p> <p>39. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 2146 Tahun 2019 tentang Susunan Tim Kerja Biro Hukum Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kpk</p> <p>40. Keputusan Pimpinan Nomor 2144 Tahun 2019 tentang Proses Bisnis Sop Interkoneksi Pengelolaan Barang Sitaan Dan Rampasan Di Lingkungan Kpk</p> <p>41. Keputusan Pimpinan Nomor 2252 Tahun 2019 tentang Penetapan Saksi Pelaku Yg Bekerjasama Jc An AS</p> <p>42. Keputusan Pimpinan Nomor 2321 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Kep Pimpinan Ttg Pemberian Perlindungan Saksi Icl</p> <p>43. Keputusan Pimpinan Nomor 2350 Tahun 2019 tentang Penunjukkan & Penetapan Besaran Honorarium Narasumber Tenaga Ahli Pendukung Utk Pengolahan Data.Informasi Putusan Dlm Aplikasi Biro Hukum</p>

No.	Kegiatan	Uraian
		<p>44. Keputusan Pimpinan Nomor 2500 Tahun 2019 tentang Surat Keputusan Ttg Pemberian Nama Auditorium Pada Gedung C-1 Kpk.</p> <p>45. Keputusan Pimpinan Nomor 2501 Tahun 2019 tentang Surat Keputusan Ttg Pemberian Nama Ruang Rapat Pada Gedung C-1 Kpk</p>
3	Rancangan perjanjian/MoU, peraturan bersama dan pakta integritas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nota Kesepahaman Nomor 164 Tahun 2019 antara KPK dengan BPJS Ketenagakerjaan. 2. Nota Kesepahaman Nomor 166 Tahun 2019 antara KPK dengan Ombudsman 3. Nota Kesepahaman Nomor 229 antara KPK dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Kerja Sama dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. 4. Nota Kesepahaman Nomor 230 Tahun 2019 antara KPK dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) tentang Kerja Sama dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 5. Nota Kesepahaman Nomor 233 Tahun 2019 antara KPK dengan Universitas Patria Artha 6. Nota Kesepahaman Nomor 242 Tahun 2019 antara KPK dengan Universitas Islam Bandung 7. Nota Kesepahaman Nomor 266 tahun 2019 antara KPK dengan BI 8. Nota Kesepahaman Nomor 441 Tahun 2019 antara KPK dengan Universitas Telkom 9. Nota Kesepahaman antara KPK dengan Kementerian Keuangan tentang Kerja Sama dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. (masih dalam proses pembahasan) 10. MoU The Anti Corruption Agency of The Republic of France and The Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia. 11. Perpanjangan Nota Kesepahaman antara KPK dengan Badan Kepegawaian Negara tentang Kerja Sama dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 12. Memorandum of Understanding KPK dengan Palestinian Anti Corruption Commission (PACC) Palestina tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 13. Memorandum of Understanding KPK dengan National Anti Corruption Commission of Thailand (NACC Thailand) tentang Kerjasama Internasional Pemberantasan Korupsi 14. Nota Kesepahaman KPK dengan KPPU 15. Perjanjian Kerja Sama Nomor 226 Tahun 2019 antara KPK dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Indonesia tentang Pendidikan, Sosialisasi, Kampanye dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. (selesai) 16. Perjanjian Kerja Sama Nomor 227 Tahun 2019 antara KPK dengan Pengadilan Negeri Kelas I Medan tentang Penempatan Alat Perekaman Sidang. 17. Perjanjian Kerja Sama Nomor 40 Tahun 2019 Perpanjangan PKS Perekaman Sidang STIH Manokwari

No.	Kegiatan	Uraian
		<p>18. Perjanjian Kerja Sama Nomor 41 Tahun 2019 Perpanjangan PKS Perekaman Sidang Universitas Andalas</p> <p>19. Perjanjian Kerja Sama Nomor 42 Tahun 2019 Perpanjangan PKS Perekaman Sidang Universitas Gadjah Mada</p> <p>20. Perjanjian Kerja Sama Nomor 43 Tahun 2019 Perpanjangan PKS Perekaman Sidang Universitas Halu Oleo</p> <p>21. Perjanjian Kerja Sama Nomor 44 Tahun 2019 Perpanjangan PKS Perekaman Sidang Universitas Jambi</p> <p>22. Perjanjian Kerja Sama Nomor 45 Tahun 2019 Perpanjangan PKS Perekaman Sidang Universitas Lampung</p> <p>23. Perjanjian Kerja Sama Nomor 46 Tahun 2019 Perpanjangan PKS Perekaman Sidang Universitas Mataram</p> <p>24. Perjanjian Kerja Sama Nomor 47 Tahun 2019 Perpanjangan PKS Perekaman Sidang Universitas Mulawarman</p> <p>25. Perjanjian Kerja Sama Nomor 48 Tahun 2019 Perpanjangan PKS Perekaman Sidang Universitas Nusa Cendana</p> <p>26. Perjanjian Kerja Sama Nomor 49 Tahun 2019 Perpanjangan PKS Perekaman Sidang Universitas Tadulako</p> <p>27. Perjanjian Kerja Sama Nomor 50 Tahun 2019 Perpanjangan PKS Perekaman Sidang Universitas Tomakaka.</p> <p>28. Perjanjian Kerja Sama Nomor 51 Tahun 2019 Perpanjangan PKS Perekaman Sidang Universitas Bengkulu</p> <p>29. Perjanjian Kerja Sama Nomor 52 Tahun 2019 Perpanjangan PKS Perekaman Sidang Universitas Bangka Belitung</p> <p>30. Perjanjian Kerja Sama Nomor 53 Tahun 2019 Perpanjangan PKS Perekaman Sidang Universitas Gorontalo</p> <p>31. Perjanjian Kerja Sama Nomor 54 Tahun 2019 Perpanjangan PKS Perekaman Sidang Universitas Khairun</p> <p>32. Perjanjian Kerja Sama Nomor 55 Tahun 2019 Perpanjangan PKS Perekaman Sidang Universitas Pattimura</p> <p>33. Perjanjian Kerja Sama Nomor 56 Tahun 2019 Perpanjangan PKS Perekaman Sidang Universitas Sam Ratulangi</p> <p>34. Perjanjian Kerja Sama Nomor 57 Tahun 2019 Perpanjangan PKS Perekaman Sidang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa</p> <p>35. Perjanjian Kerja Sama Nomor 58 Tahun 2019 Perpanjangan PKS Perekaman Sidang Universitas syiah Kuala</p> <p>36. Perjanjian Kerja Sama Nomor 59 Tahun 2019 Perpanjangan PKS Perekaman Sidang Universitas Tanjung Pura</p> <p>37. Perjanjian Kerja Sama Nomor 60 Tahun 2019 Perpanjangan PKS Perekaman Sidang Universitas Udayana</p> <p>38. Perjanjian Kerja Sama Nomor 61 Tahun 2019 Perpanjangan PKS Perekaman Sidang Universitas Cenderawasih</p> <p>39. Perjanjian Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perpanjangan Perjanjian KPK-Bank BNI (kartu kredit)</p> <p>40. Perjanjian Kerja Sama Nomor 69 Tahun 2019 antara Deputi Bidang Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada sistem Elektronik di Komisi Pemberantasan Korupsi.</p>

No.	Kegiatan	Uraian
		<p>41. Perjanjian Kerja Sama Nomor 208 Tahun 2019 antara Deputi Bidang Informasi dan Data pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pengintegrasian Data dan/atau Informasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan.</p> <p>42. Perjanjian Kerja Sama Nomor 165 Tahun 2019 antara KPK dengan Universitas Palangka Raya</p> <p>43. Perjanjian Kerja Sama Nomor 167.1 Tahun 2019 antara KPK dengan Direktorat Pengamanan Obyek Vital Polda Metro Jaya tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.</p> <p>44. Perjanjian Nomor 231 Tahun 2019 tentang Penyediaan Informasi Telekomunikasi SMARTFREN</p> <p>45. Perjanjian Nomor 232 Tahun 2019 tentang Penyediaan Informasi Telekomunikasi XL AXIATA</p> <p>46. Perjanjian Kerja Sama Nomor 375 tentang Penempatan Perangkat Perekaman Sidang di PN Samanrinda.</p> <p>47. Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang Penempatan Alat Perekaman Sidang.</p> <p>48. Perjanjian KPK dengan Yayasan Auriga terkait Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dan PPNS pada Sektor Sumber Daya Alam</p> <p>49. Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan Direktorat Jenderal Pemasarakatan tentang Aplikasi Sistem Database Pemasarakatan.</p> <p>50. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedepuitan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Kedepuitan Statistik Sosial Badan Pusat Statistik.</p>
4	Penanganan Perkara (Litigasi)	<p>PRAPERADILAN 2019</p> <p>1. Praperadilan Nomor 150/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel; Pemohon LSM Indonesia Fight Corruption; (Menang)</p> <p>2. Praperadilan Nomor 171/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel; Pemohon Ahmad Mazuqi; (Dicabut)</p> <p>3. Praperadilan Nomor 127/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel; Pemohon Islan Hanura; (Menang)</p> <p>4. Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel; Pemohon LSM MAKI (Menang)</p> <p>5. Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel; Pemohon Enny Julie (Menang)</p> <p>6. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel; Pemohon Abdul Latif; (Menang)</p> <p>7. Praperadilan Nomor 22/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel; Pemohon Samin Tan; (Dicabut oleh Pemohon)</p> <p>8. Praperadilan Nomor 28/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel; Pemohon M. Romahurmuza; (Menang)</p> <p>9. Praperadilan Nomor 34/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel; Pemohon Surya Darmadi; (Menang)</p> <p>10. Praperadilan Nomor 42/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel; Pemohon PT Palma Satu; (Dicabut oleh Pemohon)</p> <p>11. Praperadilan Nomor 48/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel; Pemohon Sofyan Basir; (Dicabut oleh Pemohon)</p> <p>12. Praperadilan Nomor 54/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel; Pemohon LSM MAKI; (Dicabut oleh Pemohon)</p> <p>13. Praperadilan Nomor 55/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel; Pemohon LSM MAKI; (Dicabut oleh Pemohon)</p> <p>14. Praperadilan Nomor 56/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel; Pemohon LSM MAKI; (Dicabut oleh Pemohon)</p> <p>15. Praperadilan Nomor 67/Pid.Pra/2019/PN.Jkt Sel; Pemohon LSM MAKI; (Menang)</p>

No.	Kegiatan	Uraian
		<p>16. Praperadilan Nomor 68/Pid.Pra/2019/PN.Jkt Sel; Pemohon LSM MAKI; (Menang)</p> <p>17. Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.Bpp; Pemohon LSM MAKI; (Menang)</p> <p>18. Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Dpu; Pemohon LSM LPPKP; (Menang)</p> <p>19. Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN.Plg; Pemohon Depy Irawan dan Dear Fauzul Azim; (Menang)</p> <p>20. Praperadilan Nomor 90/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel; Pemohon LSM MAKI; (Menang)</p> <p>21. Praperadilan Nomor 91/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel; Pemohon LSM MAKI; (Menang)</p> <p>22. Praperadilan Nomor 92/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel; Pemohon LSM MAKI; (Menang)</p> <p>23. Praperadilan Nomor 102/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel; Pemohon LSM MAKI; (Dicabut oleh Pemohon)</p> <p>24. Praperadilan Nomor 106/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel; Pemohon M. Tamzil; (Menang)</p> <p>25. Praperadilan Nomor 115/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel; Pemohon Djoko Saputro; (Menang)</p> <p>26. Praperadilan Nomor 117/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel; Pemohon LSM MAKI (Menang)</p> <p>27. Praperadilan Nomor 3/Pid.Prap/2019/PN.Tpg; Pemohon LSM MAKI; (Menang)</p> <p>28. Praperadilan Nomor 125/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel; Pemohon LSM MAKI; (Dicabut oleh Pemohon)</p> <p>29. Praperadilan Nomor 126/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel; Pemohon I Nyoman Dhamantra; (Menang)</p> <p>30. Praperadilan Nomor 130/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel; Pemohon Imam Nahrawi; (Menang)</p> <p>31. Praperadilan Nomor 137/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel; Pemohon Elvyanto; (Menang)</p> <p>32. Praperadilan Nomor 144/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel; Pemohon Hartoyo; (Dicabut oleh Pemohon)</p> <p>PERKARA REGISTER 2019 TAPI BELUM SELESAI DI DESEMBER 2019</p> <p>1. Praperadilan Nomor 151/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel; Pemohon Bartholomeus Toto; Putusan dijadwalkan 14 Januari 2020.</p> <p>2. Praperadilan Nomor 34/Pid.Pra/2019/PN.Bandung; Pemohon Dortiana Hutabarat dan Robert Jhonlyncoln Hutabarat; Persidangan dimulai 16 Januari 2020.</p> <p>3. Praperadilan Nomor 154/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel; Pemohon PT Palma Satu; Belum ada relaas baru sampai awal Januari 2020.</p> <p>4. Praperadilan Nomor 156/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel; Pemohon LSM MAKI, LP3HI, dan PEKA = Sidang Pertama tanggal 20 Januari 2020</p> <p>5. Praperadilan Nomor 157/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel; Pemohon LSM MAKI, LP3HI, dan PEKA = Sidang Pertama tanggal 20 Januari 2020.</p> <p>6. Praperadilan Nomor 158/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel; Pemohon LSM MAKI, LP3HI, dan PEKA = Sidang Pertama 13 Januari 2020.</p> <p>7. Praperadilan Nomor 159/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel = Pemohon LSM MAKI, LP3HI, dan PEKA = Sidang Pertama 20 Januari 2020.</p> <p>8. Praperadilan Nomor 161/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel = Nurhadi = Sidang Pertama 13 Januari 2020.</p>

No.	Kegiatan	Uraian
		<p>PERKARA REGISTER 2019 TAPI BELUM SELESAI DI DESEMBER 2019</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Praperadilan Nomor 151/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel; Pemohon Bartholomeus Toto; Putusan dijadwalkan 14 Januari 2020. 2. Praperadilan Nomor 34/Pid.Pra/2019/PN.Bandung; Pemohon Dortiana Hutabarat dan Robert Jhonlyncoln Hutabarat; Persidangan dimulai 16 Januari 2020. 3. Praperadilan Nomor 154/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel; Pemohon PT Palma Satu; Belum ada relaas baru sampai awal Januari 2020. 4. Praperadilan Nomor 156/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel; Pemohon LSM MAKI, LP3HI, dan PEKA = Sidang Pertama tanggal 20 Januari 2020 5. Praperadilan Nomor 157/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel; Pemohon LSM MAKI, LP3HI, dan PEKA = Sidang Pertama tanggal 20 Januari 2020. 6. Praperadilan Nomor 158/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel; Pemohon LSM MAKI, LP3HI, dan PEKA = Sidang Pertama 13 Januari 2020. 7. Praperadilan Nomor 159/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel = Pemohon LSM MAKI, LP3HI, dan PEKA = Sidang Pertama 20 Januari 2020. 8. Praperadilan Nomor 161/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel = Nurhadi = Sidang Pertama 13 Januari 2020. <p>PERDATA 2019</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perdata Nomor 421/Pdt.G/2018/PN.Smg; Penggugat Anik Utaminingsih; (Menang) 2. Perdata Nomor 431/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel; Penggugat Agus Supriadi; (Menang) 3. Perdata Nomor 210/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel; Penggugat Alexius Tantrajaya; (Menang) 4. Perdata Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Tsm, Penggugat Yaya; Menang di tingkat Pengadilan Negeri, namun Penggugat mengajukan upaya hukum Banding. 5. Perdata Nomor 3310/Pdt/2018 Jo Nomor 350/PDT/2017/PT.SMG Jo Nomor 129/Pdt.G/2016/PN.Skt; Penggugat Poppy Femialya; (Menang pada tahap Kasasi di Mahkamah Agung). 6. Perdata Nomor 144/Pdt.G/2019/PN.Tng; Penggugat Sjamsul Nursalim; (Gugatan dicabut oleh Penggugat). <p>PERKARA REGISTER 2019 TAPI BELUM SELESAI DI DESEMBER 2019</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Perdata Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Tsm, Penggugat Yaya Purnomo; Penggugat mengajukan upaya hukum Banding pada Pengadilan Tinggi. 8. Perdata Nomor 382/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel; Penggugat Halimah; Persidangan Tahap Kesimpulan 16 Januari 2020. 9. Perdata Nomor 393/Pdt.G/2019/PN.Bdg; Penggugat Amin dan kawan-kawan; Tahap pemanggilan Para Pihak. 10. Perdata Nomor 954/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel; Penggugat Abdul Latif; Belum ada relaas baru sampai awal Januari 2020. 11. Perdata Nomor 1013/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel; Penggugat Muslimin; Tahap Pemanggilan Para Pihak. 12. Perdata Nomor 340/Pdt.G/2019/PN.Skt; Penggugat Poppy dan Irjen Pol. Djoko Susilo; Tahap Pemanggilan Para Pihak. 13. Perdata Nomor 526/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel; Penggugat ; Tahap Panggilan Koran oleh Penggugat terhadap pihak yang digugat dalam perkara yang masih belum diketahui domisili hukumnya. 14. Perdata Nomor 252/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Timur (Banding), KPK selaku Penggugat Intervensi, putusan tingkat PN = Putusan Sela menyatakan permohonan intervensi KPK tidak dapat diterima.

No.	Kegiatan	Uraian
		<p>15. Perdata Nomor 77/PDT/2019/PT.MTR jo No. 39/Pdt.G/2018/PN.Pya; Penggugat Lalu Ramli dkk; (Menang pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, saat ini dalam proses Kasasi.</p> <p>16. Perdata Nomor 29/Pdt.G/2018/PN.Bjn; Penggugat Rosmini; (Menang di tingkat Pengadilan Negeri); Saat ini proses Banding di Pengadilan Tinggi.</p> <p>TATA USAHA NEGARA</p> <p>1. Perkara TUN Nomor 160/B/2019/PT.TUN-JKT Jo. Nomor 213/G/2018/PTUN-JKT; (Kalah pada tahapan Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara); KPK mengajukan upaya hukum Kasasi.</p> <p>2. Perkara TUN Nomor 206/G/2017/PTUN-JKT Jo. Nomor 225/B/2018/PT.TUN-JKT Jo. Nomor 129 K/TUN/2019; Pemohon Poppy Femialya; (Menang pada tahap Kasasi di Mahkamah Agung).</p> <p>PERKARA REGISTER 2019 TAPI BELUM SELESAI DI DESEMBER 2019</p> <p>Perkara TUN Nomor 213/G/2018/PTUN-JKT Jo. Nomor 160/B/2019/PT.TUN-JKT; Pemohon: Sudjanarko, Dian Novianthi dan Hotman Tambunan; (Masih dalam tahap Kasasi di Mahkamah Agung)</p>
5	Pemenuhan bantuan hukum di luar persidangan (non-litigasi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan pegawai KPK atas nama YAI 2. Pendampingan pegawai KPK atas nama G dan F 3. Pendampingan pegawai KPK atas nama NB 4. Pendampingan Pimpinan KPK atas nama AR dan LMS 5. Pendampingan pegawai KPK atas nama MF 6. Pendampingan pegawai KPK atas nama TAS 7. Pendampingan pegawai KPK atas nama U dan RH 8. Mewakili Pimpinan atas panggilan Ombudsman RI cq. Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya terkait dugaan maladministrasi dalam pengeluaran dan pengawalan Tahanan IM yang melakukan pemeriksaan kesehatan di RS MMC
6	Fasilitator bantuan hukum	<p>Fasilitator Bantuan Hukum terhadap tersangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ABT perkara suap Gubernur Kepri 2. ABT perkara TPK DPRD Sumut 3. AD perkara TPK pengadaan jembatan waterfront city- Kab. Kampar 4. AS perkara TPK Bupati Kudus 5. AN perkara TPK pengadaan SDM di Perum PJT II jatiluhur 6. BL perkara TPK Bupati Talaud 7. RH (perpanjangan ke-3 sejak 2016) perkara TPPU panitera PN. Jakarta utara 8. UR perkara Suap Bupati labuhan batu 9. WTH perkara TPK walikota Pasuruan